# PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**(Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)**

**PEMBIMBING:**
**Dr. Ony Widilestarininngtyas, SE., M.Si., Ak., CA**

**Oleh:**
**ERLANGGA KUSUMA RAHARDI**
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**
**Email: erlanggakusuma4@gmail.com**

***ABSTRACT***

*This study aims to find out the Competence of Competence, Regional Financial Accounting Systems and Information Technology Utilization of the Quality of Local Government Financial Reports on the West Bandung Regency Regional Work Unit.*

*The method used The unit of analysis in this study is the Regional Work Unit in West Bandung Regency. The sampling technique in this study is the saturated sample method. The analysis technique used is Smart PLS 2.0.*

*The conclusion of this study is Competency, Regional Financial Accounting System and Information Technology Utilization in the Quality of Local Government Financial Reports are good. The results showed that Competence significantly influenced the Quality of Local Government Financial Reports, the Regional Financial Accounting System significantly to the Quality of Local Government Financial Reports and Information Technology Utilization significantly influenced the Quality of Local Government Financial Reports in the West Bandung Regency Regional Work Unit.*

***Keywords: Competencies, Regional Financial Accounting Systems, Information Technology, and Quality of Local Government Financial Reports***

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan media informasi untuk membantu *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dalam keputusan politik, ekonomi, dan sosial sehingga keputusan yang diambil bisa berkualitas (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi ransaksi yang dibuat oleh suatu entitas pelaporan (Nunuy Nur Afiah, 2009). Laporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna jika informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2015).

Fenomena yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat ialah diraihnya kembali opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, penyebab diraihnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ialah soal pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Sejumlah aset tersebut sebagian besar merupakan limpahan dari daerah induk, yakni Kabupaten Bandung. Kepemilikan aset daerah saat ini hanya berpegang kepada surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung. (Endang Hermawan, 2018).

Untuk membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas perlu dimilikinya pegawai negeri sipil yang berkompeten yang memiliki karakteristik dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efisien, profesional dan efektif (Sudarmanto,

2015). Adapun fenomena terkait Menurut Bendahara Pengeluaran Endang Hermawan mengatakan mayoritas pegawai sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup dibuktikan dengan latar belakang pendidikan terakhir strata 1 namun masih ditemukan penyajian laporan keuangan yang terlambat dari waktu yang sudah di tetapkan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah (Abdul Halim, 2014).

Fenomena lain yang terjadi yaitu menurut Endang Hermawan Bendahara Pengeluaran banyaknya kegiatan fisik pencairan dana dan hal hal lain yang berhubungan dengan laporan keuangan, walaupun telah di terapkan nya sistem akuntansi keuangan daerah dengan optimal namun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan belum optimal. Hal ini disebabkan kesalahan dalam pencatatan nama akun atau penggolongan nomor akun contohnya Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung. Seringkali terjadi salah catat aset seharusnya dokumen dari Kabupaten Bandung malah tercatat di Kabupaten Bandung Barat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan pemerintahan untuk mengambil keputusan yang strategis (Tata Sutabri, 2014).

Fenomena terkait ialah terdapat teknologi yang terintegrasi dan pemanfaatannya telah didukung oleh jaringan yang baik dan pengguna yang sudah dibekali pengetahuan umum tentang pemanfaatan teknologi informasi tetapi masih ditemukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga harus dilakukan pengecekan ulang secara terus menerus. Hal ini menghambat waktu untuk pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah (Endang Hermawan, 2018).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu penulis mengangkat judul **"Pengaruh Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfataan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)".**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Ditemukan mayoritas pegawai sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dibuktikan dengan latar belakang pendidikan terakhir strata 1 namun masih ditemukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak baik ditandai dengan penyajian laporan keuangan yang terlambat dari waktu yang sudah di tetapkan
2. Sistem akuntansi keuangan daerah telah di bantu oleh sistem akuntansi keuangan daerah, tetap terjadi kesalahan dalam pencatatan nama akun atau penggolongan nomor akun contohnya Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung. Seringkali terjadi salah catat aset seharusnya dokumen dari Kabupaten Bandung malah tercatat di Kabupaten Bandung Barat
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang sudah terintegrasi serta optimal tetapi masih ada kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi contohnya masih ditemukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga harus dilakukan pengecekan ulang secara terus menerus.

## 1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur tentang pengaruh kompetensi, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 1.4 Kegunaaan Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memecahkan masalah dan dijadikan sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui pengujian kompetensi, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknlogi informasi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Bandung Barat.

#### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pembanding dalam pengembangan penelitian yang terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfataan teknologi informasi dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang akuntansi serta diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi kompetensi, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfataan teknologi informasi.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Kompetensi

Menurut Ardeno Kurniawan (2015: 118) Kompetensi adalah Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Sedangkan menurut Sudarmanto (2015:46) Kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil yang berupa Pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

#### 2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Sedangkan menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah.

#### 2.1.3 Teknologi Informasi

Menurut I Putu Agus Swastika (2016:2) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan

pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.

Sedangkan menurut Hery Nuryanto (2012:23) teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliput memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

### 2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:26) laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2015:19) laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Komptensi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori yang ada menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:6) adalah salah satu hal mendasar LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI dikarenakan langkanya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurendah Ragillita Untary, Moh Didik Ardiyanto (2015), Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori yang ada menurut Mahmudi (2016:27) adalah sistem akuntansi keuangan daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuli Artika (2016) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 2.2.3 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori menurut Wawan (2009:2) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat dan tepat waktu yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil peneltian yang dilakukan Liza Mutiana, Yossi Diantimala dan Zuraida (2017) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis sementara untuk mengetahui hubungan antara Kompetensi (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas

Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y) maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_1$: Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_2$: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_3$: Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan metode penelitian dekriptif dengan pendekatan kuantitatf digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli.

Dalam Penelitian ini, metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif tersebut digunakan untuk menguji variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang dipengaruhi oleh variabel Kompetensi ( $X_1$), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ($X_2$) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ($X_3$) serta menguji suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

### 3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Sugiyono (2017:39) adalah "segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya"

### 3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

### 3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

#### 3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah general yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 responden yang berada di 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

#### 3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sempel jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 responden yang berada di 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

#### 3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan di 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada April 2018 sampai dengan Juli 2018.

### 3.5 Metode Pengujian Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner sehingga data yang diperoleh dari responden perlu diuji keabsahannya. Untuk menguji kesungguhan jawaban responden diperlukan dua macam pengujian, yaitu uji validitas dan uji realiabilitas.

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh Kompetensi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

### 3.6.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS* v.3.2.6 2017.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang disebar kepada 40 pegawai dari 20 SKPD di Kabupaten Bandung Barat, dari kuesioner yang disebar didapat kuesioner yang kembali adalah 40 kuesioner. Kemudian dilanjutkan dengan analisis Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk menganalisis pengaruh kompetensi, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (validity) dan keandalan (reliability) berupa butir item pernyataan yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

#### 4.1.1.1 Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas > 0,30. Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel *SPSS* di dapat seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur keempat variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 (>0,30), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

#### 4.1.1.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan teknik belah dua atau sering disebut *Split Half*. Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) atau andal.

### 4.1.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan maupun variabel penelitian secara keseluruhan yang meliputi Komptensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfataan Teknologi Informasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### 4.1.2.1 Analisis Deskriptif Mengenai Kompetensi

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai kompetensi, peneliti mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel kompetensi terdiri dari 3 (tiga) item indikator. Indikator-indikator tersebut adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari tabel hasil pengolahan *SPSS* memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kompetensi sebesar 67,83% berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi berada dalam kategori cukup

baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 32,17%, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kompetensi.

.

#### 4.1.2.2 Analisis Deskriptif Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, peneliti mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) item indikator. Indikator-indikator tersebut adalah pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.. Dari tabel hasil pengolahan *SPSS* memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 532 (66,50%) berada di antara interval 52,00% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada dalam kategori cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 33,50% hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

#### 4.1.2.3 Analisis Deskriptif Mengenai Pemanfataan Teknologi Informasi

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai pemanfaatan teknologi informasi, peneliti mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 4 (empat) item indikator: integrasi, keandalan, ketersediaan dan keluwesan. Dari tabel hasil pengolahan *SPSS* memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 544 (68,00%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi.

#### 4.1.2.4 Analisis Deskriptif Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 4 (empat) item indikator: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari tabel hasil pengolahan *SPSS* memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 540 (67,50%) berada di antara interval 52,01%-68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 4.1.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini, terdapat 14 variabel manifes dan 4 variabel laten yakni Kompetensi ($X_1$) yang dikur dengan 3 variabel manifes, Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah ($X_2$) dengan 3 variabel manifes dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dengan 4 variabel manifes dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan 4 variabel manifes. Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai Pengaruh Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 40 pegawai dari 20 SKPD di Kabupaten Bandung Barat menggunakan *software SmartPLS.*

**4.1.3.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Evaluasi terhadap *outer model* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel *manifest*nya (*measurement model*). Untuk mengevaluasi outer model, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas dalam *Partial Least Square* (PLS) terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity.*

**1. Uji Validitas**

**A. *Convergent Validity***

*Convergent validity* berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji *convergent validity* dengan *software* PLS dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus lebih besar dari 0,5. Berdasarkan table pemngolahan *SPSS* dapat dijelaskan mengenai nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai ≥ 0,6 yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

B. ***Discriminant Validity***

*Discriminant validity* dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Yamin, 2009:222).

Nilai *cross loading* korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Sedangkan nilai akar AVE, setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel laten. Ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

**2. Uji Realibilitas**

Berdasarkan tabel pengolahan *SPSS* nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 Imam Ghozali (2013:212) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

**3. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,370. Nilai GoF sebesar 0,608 menurut (Sugiono, 2013:250) tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong kuat atau tinggi.

**4.1.3.2 Pengujian Model Struktural *(Inner Model)***

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien jalur struktural $X_1$ terhadap Y sebesar 0,470, koefisien jalur struktural $X_2$ terhadap Y sebesar 0,230, dan koefisien jalur struktural $X_3$ terhadap Y sebesar 0,171. Menurut penghitungan koefisien determinasi didapatkan hasil:

1. Kompetensi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 36,9% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan kontribusi pengaruh

sebesar 16,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 11,7% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,652 atau 65,2%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Kompetensi($X_1$), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ($X_2$), Pemanfaatan Teknologi Informasi ($X_3$) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 65,2% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 34,8% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti ($\zeta$) seperti Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Komitmen Organisasi, Pemahaman Akuntansi. Dan Lain-Lain

### 4.1.4 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh ketiga variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian hipotesis.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung}$ sebesar 4,667 dengan nilai $t_{tabel}$ sebesar 2,026. Dikarenakan nilai $t_{hitung}$ lebih besar dari nilai $t_{tabel}$ (4,667 > 2,026). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kompetensi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin baik kompetensi maka akan diikuti semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori M. Yusuf (2013:154) mengemukakan bahwa apabila tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah atau tidak bisa memberikan pelayanan perizinan dengan baik, itu juga karena pegawainya kurang kompeten.

Kemudian teori dari Abdul Hafiz Tanjung (2014:6) menjelaskan salah satu hal mendasar LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI dikarenakan langkanya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun Hasil Koefisien determinasi menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 36,9% dan sisanya sebesar 63,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, komitmen organisasi, pemahaman akuntansi.

.

### 4.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung}$ sebesar 2,197 dengan nilai $t_{tabel}$ sebesar 2,026. Dikarenakan nilai $t_{hitung}$ lebih besar dari nilai $t_{tabel}$ (2,197 > 2,026), sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan diikuti semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mahmudi (2016:27) mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah

disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Adapun menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:76) disebutkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemda. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuaangan pemda di Indonesia. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang harus dilaksanakan oleh setiap pemda.

Adapun Hasil Koefisien determinasi menunjukkan bahwa Besarnya Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 16,6% dan sisanya sebesar 83,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, komitmen organisasi, pemahaman akuntansi.

### 4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung}$ sebesar 2,305 dengan nilai $t_{tabel}$ sebesar 2,026. Dikarenakan nilai $t_{hitung}$ lebih besar dari nilai $t_{tabel}$ (2,305 > 2,026). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara pemanfaatan teknologi informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan diikuti semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Wawan Setiawan (2009:2) Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat dan tepat waktu yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan

Adapun hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 11,7% dan sisanya sebesar 88,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, komitmen organisasi, pemahaman akuntansi.

## V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai Pengaruh Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 40 pegawai dari 20 SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik Kompetensi maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun ada beberapa yang menyebabkan kompetensi kurang optimal yaitu pada Pengetahuan. Sehingga kompetensi pun kurang optimal. Dan berimbas pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum optimal juga.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 40 pegawai dari 20

SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun ada beberapa yang menyebabkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kurang optimal yaitu dalam segi pencatatan. Sehingga pengetahuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kurang optimal. Dan berimbas pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum optimal juga.

3. Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 40 pegawai dari 20 SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik Teknologi Informasi maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun ada beberapa yang menyebabkan Teknologi Informasi kurang optimal yaitu pada segi ingetrasi nya. Sehingga berimbas pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum optimal juga.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Operasional

1. Agar kompetensi semakin baik maka para pegawai perlu untuk bertanggung jawab sesuai dengan pengetahuan atau disiplin ilmunya yang mereka geluti ketika mereka melaksanakan sekolah atau pendidikan formal nya dengan cara dilakukan pendidikan dan pelatihan dalam bidang akuntansi bagi para pegawai nya, agar kompetensi terus meningkat dan akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik pula.
2. Agar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah semakin baik maka para pegawai diharapkan untuk hati-hati dalam melakukan pencatatan, agar mendukung hal tersebut diharapkan juga instansi nya melakukan sistem *reward* dan *punishment* bagi yang melakukan kesalahan atau keunggulan dalam bidang pencatatan akuntansi nya
3. Agar Teknologi Informasi semakin baik, sebaiknya adanya perbaikan sistem informasi akuntansi agar lebih terintegrasi satu sama lain. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan rekrutment bagi pegawai yang mempunyai kemampuan dalam bidan teknologi informasi dan akuntansi. Agar dapat membuat sistem yang terintegrasi dan atau dapat melakukan perbaikan ketika terjadinya kesalahan dalam integrasi nya teknologi informasi. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan teknologi informasi dan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

### 5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan teknologi informasi, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain
   Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabeta

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Ardeno Kurniawan. 2015. *Audit Internal: Nilai Tambah bagi Organisasi*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. ISBN: 979 – 503– 584 – 3

Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin, 2017, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, UPP STIM YKPN

Erlina dan Rasdianto. 2015 *Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat

Hery Nuryanto. 2012. *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Balai Pustaka

I Putu Agus Swastika dan I Gusti Lanang Raditya Putra. 2016. *Audit Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi*. CV. Andi: Yogyakarta

Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS 20.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS 21, Edisi 7.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Liza Mutiana, Yossi Diantimala dan Zuraida.2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN 2502-6976

M Yusuf, 2013, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi* Revisi. Yogyakarta: UII Press

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, edisi ketiga Yogyakarta: UUP STIM YKPN

Nurmalia Hasanah Dan Achmad Fauzi, 2016, *Akuntansi Pemerintahan*, In Media

Sudarmanto. 2015 *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi. SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tata Sutabri, 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*. Edisi pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta

Wawan Setiawan, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi,* UPI

Yuli Artika, 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. JOM Fekon Vol. 3 No. 1